

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2003).
- Abdul Khaliq, Farid. *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005).
- Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press Jakarta dan Citra Media Yogyakarta, 2006, hal. 226
- Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*. Op.cit. hal. 180  
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 15/DPR RI/I/2004 – 2005 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pasal 182-188
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.
- Amrusi dkk, Imam. "*Hukum Tata Negara Islam*", (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013).
- Arif, "Mekanisme *Impeachment* Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19;2 (Maret 2021).
- Asser-Scholten, *Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Jakarta: Ichtar Baru-Van Hoeve, 2017).
- Asshiddequi, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Asshididqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2016).
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, No.Edisi 7 (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).
- Denny Indrayana dalam Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal. 195
- Djoko Prakoso, et.al. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cet Pertama, (Jakarta: PT. Bina Aksara,1987), hal. 389
- Dzilhikmah, "Kewajiban Mentaati Pemimpin Mneurut Sayyud Qutb". *Skripsi*, (Kudus: IAIN Kudus, 2020).
- Echdar, Saban. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).
- El-Qurtuby, Usman. *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2018).
- Fatwa, *Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018).
- Fauzan, E. M. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, ,2017),.
- Ghoffar, Abdul. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*

- Hakim Abdul G. Nusantara, Mahkamah Konstitusi Perpestitif Politik dan Hukum, Kompas, 24 September, 2002. Hamidi, Jajim dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2010).
- Henry Campbell, Black's Law Dictionary: Definitions of term and Phrase of American and English Jurisprudence, Ancient and modern, (St. Paul, Minn: West Group, 1991), hal. 516.
- Husain, Muhammad Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009).
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Jimly. Asshiddiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Poluler, 2007).
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary, cet XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 312.
- KRHN Kemitraan, Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jakarta, 2003, hal. 7.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2014).
- Konstitusi, Mahkamah. *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2005).
- Kristiyanto, Eko. Noer. Pemakzulan Presiden republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 3.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. kelima*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983).
- M Ahmadi, Fahmi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung; Membumikan Tauhid Sosial Menegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Cet Pertama (Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998), hal. 180
- Mahmud Marzuki, Peter. (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*
- Mamudji, et al., *Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 6.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Prakoso Djoko, et.al. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cet Pertama, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hal. 389
- Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*.

- Rahman, A. "Pemakzulan Kepala Negara". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15:2, (Mei 2017).
- Ridwan, Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2007).
- Roestandi Achmad, Mahkamah Konstitusi Dalam Tannya Jawab; Legal Standing, Judicial Review, Constitutional Complaint, Generasi HAM, Kewajiban Asasi Manusia, Constitutional Right, Badan Hukum Privat dan Publik, Lembaga Negara, Sistem Kepartaian, Pemilu, Impeachment, dan lain-lain, Cet 1(Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2006),hal. 1-2.
- Soeharyo, Salamoen & Nasri Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sri Soemantri, Hak menguji Material di Indoneisa, (bandung:1986) hal. 47 mengutip Ph. Kleintjes, *Staasinstellingen van Nederlansch Indie*.
- Sulistiani, A. "Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)" *Jurnal Al-Dustur*, 1:1 (2019).
- Suryawan, & Arthanaya, Krisna. "Mekanisme Impeachment Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1;2 (Juni 2020).
- Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Deepublish, (Jakarta: , 2014).
- Syahrum, Salim. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Teras, Agustin Narang, *Reformasi Hukum: Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).
- Widiyanti, Yeyen. "Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri Kedaton Bandar Lampung", (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1441 H/2020 M)," (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam).
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

## Jurnal

- Alfath Satriya, Catur. "Karakteristik Pemakzulan Presiden di Indonesia Characteristic of Presidential Impeachment in Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Nomor 3, Volume: 19, (September 2022).
- Majid, Abdul. "Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 19: Nomor 2 (Desember 2021).
- Madjid, Abdul. "Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 19:2 (Desember 2022).
- Ngurah Bayu Krisna, Gusti Bagus Suryawan, Wayan Arthanaya, I Gede. "Mekanisme Impeachment Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2020).
- Prabowo, Edi. "Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden : Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Brasil", *Journal of Indonesian Law*, Volume 1, Nomor 2, (Desember 2020).

Prayitno, H. B. “Proses Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Menurut UUD Neagra Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapay DPR-RI”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8;2 (April 2021).

Zulhidayat, M. “Perbandingan Konstitusional: Pengaturan *Impeachment* di Indonesia dan Italia. *Jurnal Hukum Replik*, 7:1, (2020).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan dari Presiden Soekarno.

TAP MPR nomor III tahun 1978 Jo. TAP MPR nomor VII tahun 1973. Alasan tersebut tentang pemakzulan presiden

